

KAITAN ETNISITAS DENGAN KONFLIK SOSIAL DAN KEKERASAN MASSA, DI TIGA DAERAH DI INDONESIA*

Henny Warsilah**

ABSTRACT

This article is based on the field research of social conflicts in three areas in Indonesia (Tasikmalaya-West Java, Pekalongan-Central Java and Situbondo-East Java). In general it discusses the relationship between ethnicity (culture) and social conflict. The process of islamisation in the three areas has divided society into traditional moslem and the modernist. (In these conflicts, the state used a centralistic power to solve these conflicts, and transform it in quasi integrative). The centralistic attitude of new order government are supported by dual-function of ABRJ and have resulted in the increasing state of social conflict.

Pendahuluan

Dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini paling sedikit bangsa Indonesia mengalami beberapa peristiwa besar dan penting. Pertama munculnya kerusuhan dan kekerasan massa yang

* Artikel ini merupakan hasil pengembangan dari tulisan "Faktor Sosial Budaya Penyebab Kerusuhan Sosial dan Kekerasan Massa" yang merupakan hasil tulisan penulis sendiri dalam rangkuman hasil penelitian Kekerasan Massa Faktor Penyebab dan Pemicu . IPSK-LIPI, tahun 1998.

**Penulis adalah peneliti pada Puslitbang Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB)-LIPI.

terbingkai dalam konflik etnik, agama dan rasial yang terjadi sejak awal tahun 1997 berkelanjutan hingga sekarang di pelbagai kota di Indonesia. Kedua, runtuhnya rezim orde baru di bawah pimpinan mantan presiden H.M Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun, diikuti oleh masa pemerintahan transisi pimpinan presiden B.J Habibie. Ketiga, lepasnya propinsi termuda Timor-Timur dari negara Indonesia, melalui tawaran dua opsi (integrasi dengan Indonesia atau merdeka) yang ditawarkan presiden Habibie. Kemenangan kubu pro kemerdekaan inilah yang telah menjadi salah satu kunci pokok mundurnya Habibie dari calon presiden keempat. Keempat, pemerintahan transisi yang dipimpin oleh Habibie pada akhirnya harus turun, karena selain pertanggung jawabannya ditolak oleh MPR yang baru, juga adanya tekanan luar biasa dari gerakan mahasiswa, dan golongan menengah. Kelima, terpilihnya K.H. Abdurrachman Wahid sebagai presiden RI yang ke lima, dan Megawati Sukarno Putri sebagai wakil presiden RI untuk masa jabatan tahun 1999-2004, melalui pemilu yang demokratis, menandai keberhasilan Orde Reformasi yang mendahulukan kedaulatan rakyat dari pada kedaulatan negara.

Berbagai peristiwa yang bermuara pada konflik sosial selama beberapa tahun terakhir ini, memperlihatkan suatu proses kegagalan dari kesatuan bangsa yang seharusnya didasarkan pada kemajemukan etnik dan kebudayaan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa, bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk bertumpu kepada pluralistas etnik, ras, agama, kebudayaan dan bahasa, seperti dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. Tetapi realitanya, pada masa pemerintahan rezim Orde Baru, negara, tampil sebagai kekuatan tunggal dan melakukan politik hegemoni untuk melakukan kesatuan bangsa. Politik hegemoni yang cenderung sentralistik itu, ternyata makin menguatkan posisi *state* dan melemahkan peran *society*, dan semakin menjauhkan cita-cita kesatuan bangsa yang berdasarkan kemajemukan Indonesia. Sebagai konsekuensinya sering timbul konflik sosial, ekonomi dan politik di pelbagai daerah di Indonesia, yang cenderung menjadi konflik massal bahkan menjurus ke suatu bentuk perang saudara. Kondisi demikian tentunya akan mengancam kepada disintegrasi negara Indonesia.

Bermula dari pecahnya konflik massal di daerah Sangauledo-Kalimantan Barat sebelum pemilu 1997, dan terus berlanjut hingga mendekati awal tahun 2000 mendatang. Konflik yang terjadi antara etnis dayak dan madura, yang memakan ratusan korban jiwa dan kerugian harta benda tak terkira dan berakibat terhadap "pembersihan" dan "pengusiran" etnik madura dari Kalimantan Barat. Kerusakan lainnya juga menimbulkan dampak merugikan, terutama bagi golongan masyarakat non-pribumi. Terutama pada peristiwa "natal kelabu" di Tasikmalaya, Rengas Dengklok, Pasuruan, Probolinggo, Pekalongan, Situbondo, Banjarmasin, dan Ujung Pandang. Kasus terbaru terjadi di Ketapang, Jakarta Barat yang melibatkan warga setempat dengan kelompok pemuda berasal dari Ambon, kemudian dilanjutkan dengan aksi "pembalasan" di daerah kupang, timor. Dimana terjadi penyerangan terhadap warga kota, terutama yang berasal dari Ujung Pandang, puncaknya meledak peristiwa Ambon dan Kalimantan. Peristiwa berdarah sepanjang dua tahun terakhir ini, mencerminkan aspirasi pluralitas yang tidak terakomodasi dalam program (pembangunan) pemerintah, dan terjadinya kesenjangan ekonomi, politik, dan sosial diantara penduduk lokal dan penduduk pendatang terutama dipelbagai daerah perkotaan.

Dalam suasana yang demikian konfliktualnya, sebagai kelompok akademisi, justru diharapkan untuk memasuki area yang dianggap 'terlarang' selama ini, sehingga dapat menentukan kebenaran obyektif melalui kajian-kajian tentang hubungan antara etnisitas dengan konflik sosial dan kekerasan massa. Dengan demikian, didapat benang merah dalam hal penyelesaian konflik sosial dan kekerasan massa, dan dapat melakukan prediksi atas kondisi konfliktual yang akan muncul pada waktu-waktu mendatang, sehingga konflik tersebut dapat dicegah di kemudian hari.

Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian tentang hubungan etnisitas dengan konflik sosial dan kekerasan massa di tiga daerah penelitian (Tasikmalaya-Jabar, Pekalongan-Jateng dan Situbondo-Jatim) adalah *sociological approach*, dimana kompok-kelompok etnik dominan merupakan unit analisis utama. Untuk memperoleh hasil maksimal,

penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, responden yang terjaring melalui tehnik kuesioner sebesar 304 responden, dengan rincian sebagai berikut: Tasikmalaya sebanyak 105 responden, Pekalongan 100 orang dan Situbondo 99 responden. Responden dipilih melalui tehnik stratified random sampling yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Secara kualitatif, informasi data diperoleh melalui tehnik depth interview dari informan kunci yang berasal dari berbagai kalangan, yakni: berbagai tokoh agama, tokoh masyarakat, pengasuh pondok pesantren, santri, mahasiswa, pedagang, TNI dan Polri, ketua organisasi keagamaan (NU, Muhammadiyah, Katolik), guru, hakim dan jaksa, dan lain sebagainya. Analisnya dilakukan secara deskriptif analitis.

Sedang lokasi penelitian dipilih daerah-daerah yang beberapa kali mengalami peristiwa ledakan konflik sosial dan kekerasan, dan cenderung menjadi ajang unjuk rasa masyarakat secara berkesinambungan. Lokasi terpusat di pulau Jawa, dan lama pengumpulan data selama satu setengah bulan, total dengan pengolahan dan penulisan laporan 6 bulan (Juli s/d September 1997/1998).

Kerangka Berpikir

Konflik sosial dan kekerasan massa, pada dasarnya bersifat multidimensional. Tetapi terdapat semacam kecenderungan bahwa faktor struktural (Kesenjangan sosial, ekonomi dan politik), faktor kebudayaan (terutama etnik dan agama), dan faktor psikologis sosial (sikap arogansi aparat petugas, termasuk aparat penegak hukum) menjadi faktor utama. Faktor struktural muncul sebagai suatu kendala dalam relasi sosial antara kolektivitas-kolektivitas yang ada dalam masyarakat, yang kemudian terbingkai dalam suatu bentuk kesenjangan hubungan sosial, ekonomi dan politik. Di mana kesenjangan tersebut, cenderung akan menumbuhkan sikap kecemburuan dan stereotype terhadap kelompok etnik dan ras pendatang yang dianggap lebih berhasil secara sosial dan ekonomi dibandingkan dengan penduduk lokal.

Kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada, seringkali dianggap oleh sebagian besar masyarakat, dapat menghasilkan suatu kondisi

“keberpihakan” dalam implikasi kebijaksanaan pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Mereka yang termasuk kedalam golongan masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap kekuasaan (ekonomi dan politik), atau kelas bawah cenderung menganggap bahwa pemerintah lebih berpihak kepada kelompok elit pemegang kekuasaan. Sedang kesenjangan dalam bidang politik, lebih cenderung muncul dalam bentuk kekecewaan mendalam, karena tersumbatnya aspirasi politik dan komunikasi politik dari beberapa kelompok dalam masyarakat. Kemudian faktor etnisitas, terutama yang bermuara pada perbedaan karakteristik budaya etnik juga ikut menyumbang kepada proses disharmoni hubungan antara kolektivitas dalam masyarakat.

Selain itu faktor agama, terutama faktor kemutlakan doktrin agama dan masalah eksistensi kehidupan beragama (termasuk upacara ritual keagamaan), serta masalah pelecehan terhadap tokoh-tokoh agama ternyata juga menjadi faktor pencetus munculnya konflik latent. Padahal, dalam hal pengelolaan konflik, seperti yang dijalankan oleh pemerintahan orde baru selama ini, terdapat kecenderungan untuk menghilangkan faktor etnik dan agama, karena negara merasa trauma oleh pengalaman politik pada masa lalu. Sehingga kata-kata SARA (suku, ras, agama dan golongan) begitu ditabukan, dan menjadi momok yang menakutkan. Sebaliknya, kita harus belajar dari pengalaman bahwa, pengelolaan konflik model rejim Orde Baru, ternyata semakin mengentalkan konflik latent menjadi suatu konflik terbuka, yang cenderung diikuti oleh kekerasan massa.

Berbicara tentang konflik sosial dan kekerasan massa yang berkaitan dengan etnisitas, tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan tentang perubahan sosial, dimana faktor agama dan budaya etnik ikut berperan di dalam prosesnya. Berdasarkan pengalaman dari berbagai konflik sosial dan kekerasan massa yang selama ini terjadi di Indonesia, ada indikasi bahwa konflik tersebut terbingkai dalam masalah keagamaan, baik yang berkaitan dengan perbedaan kemutlakan doktrin agama, penghinaan terhadap tokoh agama sampai kepada acara seremonial permainan bedug pada bulan ramadhan. Pemicu dan penyebabnya bisa saja langsung berkaitan dengan masalah keagamaan di atas, atau berkaitan dengan masalah kesenjangan sosial, ekonomi dan politik antara penduduk lokal dan pendatang, untuk kemudian bergeser menjadi konflik etnik dan agama. Kondisi tersebut mencerminkan, betapa masih rendahnya pemahaman kehidupan

beragama dan tersumbatnya komunikasi antar agama yang ada dalam konteks lokal, nasional dan global.

Secara sosiologis, peran atau posisi agama dalam suatu perubahan sosial masyarakat dapat diamati melalui tiga pendekatan. Pendekatan pertama, mengatakan bahwa, agama cenderung akan mempertahankan diri apabila menghadapi perubahan sosial. Seperti dikatakan oleh Karl Marx bahwa, agama bukanlah merupakan *agent of change* (agen perubahan) dalam sejarah, melainkan hanyalah gejala yang mengikuti perkembangan di basis saja. Dalam pemikiran Marx, agak mustahil bila agama mempengaruhi perubahan sosial (Karl Marx, 1910). Pendekatan kedua, dilontarkan oleh W.F. Ogburn dalam karyanya tentang *Social Change*, bahwa unsur-unsur budaya, termasuk agama, baru belakangan mengikuti perkembangan di bidang ekonomi dan sosial (W.F Ogburn, 1923). Dua pendekatan tersebut, dianggap terlalu bersifat simplistis. Sedang pendekatan ketiga, merupakan pendekatan terbaru yang melihat peranan agama dalam perubahan sosial. Pendekatan ini menegaskan bahwa perubahan sosial adalah hasil proses-proses yang sangat kompleks, dimana di antara semua faktor terdapat hubungan saling mempengaruhi dan menentukan. Seperti faktor ekonomi, politik dan faktor sosial memang pada kenyataannya mempengaruhi sistem nilai dan keyakinan agama beserta perkembangannya. Sebaliknya, agama dan sistem nilai budayapun, mempengaruhi faktor-faktor ekonomi, politik dan sosial (lihat disertasi Weber tentang Etika protestan). Pendekatan terakhir ini, relevan untuk mengkaji situasi masyarakat Indonesia yang memiliki sifat kemajemukan yang tinggi, dimana kompleksitas pluralitas masyarakat memiliki implikasi atas timbulnya konflik-konflik sosial dalam masyarakat.

Secara sederhana konflik-konflik yang ada dalam masyarakat, dapat dikategorikan dalam tiga persoalan penting, yakni: Pertama, konflik sosial, yakni konflik yang secara terus menerus ada antara kelas-kelas sosial dalam masyarakat yang bersangkutan dengan masalah ideologi, ras dan agama. Kedua, konflik ekonomi, yaitu perbedaan kondisi hidup yang berkecukupan dengan yang tidak berkecukupan yang pada perkembangannya menjadi konflik ras dan agama. Ketiga, konflik berbagai kebudayaan masyarakat kelas bawah dengan pembesar yang memegang kekuasaan (Amiruddin, 1994).

Talcott Parsons dalam teori konfliknya, memandang konflik tidak sekedar sebagai gejala yang melekat dalam kehidupan masyarakat, akan tetapi lebih dari pada itu, bahwa konflik bersumber pada faktor-faktor yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Sebaliknya, teori fungsional-struktural, dilandasi oleh pendekatan yang bersifat integratif dan normatif, yakni memandang suatu sistem sosial dapat terintegrasi atas dasar dua landasan berikut: (1) suatu masyarakat senantiasa terintegrasi diatas tumbuhnya konsensus-konsensus di antara anggota masyarakat akan nilai-nilai kemasyarakatan yang bersifat fundamental. (2) Suatu masyarakat senantiasa terintegrasi, karena anggota masyarakatnya menjadi anggota berbagai kesatuan sosial (*cross-cutting affiliations*). Dengan demikian setiap konflik yang terjadi di antara kesatuan sosial dengan kesatuan-kesatuan sosial lainnya segera akan dinetralisir oleh adanya loyalitas ganda (*cross-cutting loyalties*) dari anggota masyarakat terhadap berbagai kesatuan sosial (Talcott Parsons, 1949:476).

Apakah kedua teori konflik tersebut cukup kondusif untuk situasi masyarakat majemuk seperti Indonesia? Hal itu menjadi pertanyaan yang harus dikaji lebih dalam. Ada baiknya dalam tulisan ini, kita pahami terlebih dahulu, sebetulnya apa yang dimaksudkan dengan masyarakat majemuk itu? Sebagaimana dikatakan oleh Geertz, bahwa masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terbagi kedalam sub-sub sistem yang kurang lebih berdiri sendiri-sendiri, dalam mana masing-masing sub sistem terikat kedalam oleh ikatan-ikatan yang bersifat primordial (Cliford Geertz, 1963). Secara lebih rinci Van den Berghe, menguraikan ciri-ciri dari sifat majemuk suatu masyarakat adalah sebagai berikut: 1) masyarakat yang memiliki segmentasi dalam bentuk kelompok-kelompok yang sering kali memiliki kebudayaan yang berbeda satu sama lain; 2) masyarakat yang memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi kedalam lembaga-lembaga yang bersifat non komplementer; 3) suatu masyarakat yang kurang mengembangkan konsensus di antara anggota masyarakatnya tentang nilai-nilai sosial yang bersifat mendasar; 4) masyarakat yang secara relatif sering sekali terjadi konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya; 5) masyarakat yang terintegrasi sosialnya relatif tumbuh di atas paksaan (*coercion*) dan memiliki saling ketergantungan dibidang ekonomi; dan 6) dalam masyarakat tersebut ada dominasi politik suatu kelompok terhadap kelompok lainnya

(Pierre Van den Berghe, 1984). Dalam ciri-ciri masyarakat majemuk yang demikian, dalam terminologi Durkheim, agak sulit untuk menumbuhkan dan mengembangkan solidaritas mekanis yang diikat oleh kesadaran kolektif, dan sulit untuk menumbuhkan solidaritas organik yang diikat oleh ketergantungan di antara bagian-bagian dari suatu sistem sosial (Durkheim, 1947).

Seperti kita ketahui, negara Indonesia memiliki tingkat kemajemukan sosio-budaya yang tinggi, yakni mencakup lebih kurang 360 kelompok etnik dan memiliki sekitar 250 bahasa yang berbeda satu sama lain (Mely G. Tan dan Budi Soeradji). Struktur masyarakat Indonesia yang demikian oleh Furnivall, diklasifikasikan sebagai masyarakat majemuk, yang dapat diamati melalui dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi horizontal dari masyarakat Indonesia, ditandai dengan adanya perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, sistem hukum, dan batas regional. Sedang dimensi vertikal masyarakat Indonesia, ditandai dengan berlangsungnya polarisasi sosial yang didasarkan atas kekuasaan dan kekayaan (Furnivall, 1967). Dimensi vertikal dari masyarakat Indonesia tersebut, pada perkembangannya dipengaruhi oleh semakin meluasnya pertumbuhan sektor ekonomi modern beserta organisasi administrasi pada skala nasional. Dimana mengakibatkan terjadinya kontras didalam pelapisan sosial masyarakat Indonesia, yakni antara orang-orang yang secara ekonomis dan politik berposisi lemah dan tidak berdaya pada lapisan bawah, dengan sejumlah kecil orang-orang yang relatif kaya dan berkuasa pada lapisan atas masyarakat. Edward Shils, lebih memerinci dimensi vertikal tersebut dengan melihat terdapatnya jurang perbedaan antara sekelompok orang-orang yang bergairah, penuh aspirasi, relatif kaya dan berpendidikan dengan sejumlah besar penduduk yang tidak memiliki pendidikan, dan tidak memiliki akses terhadap ekonomi dan politik negara (dalam Nasikun: 1990).

Dari perspektif sosiologi perkotaan, proses urbanisasi-migrasi kelompok-kelompok etnik ke daerah perkotaan, menjadi faktor penguat terhadap peristiwa tersebut. Kehadiran suatu kelompok etnik, dengan perangkat kebudayaannya yang dominan, pada realitanya, tidak selalu menghasilkan relasi dan interaksi sosial antara masyarakat lokal dan pendatang. Tetapi, dapat juga menghasilkan suatu kondisi konflik sosial yang "*crusial*". Pada tatanan masyarakat, asimilasi antara kelompok-kelompok etnis, akan tergantung dari jauh dekatnya

“jarak budaya” antara kelompok etnis yang satu dengan kelompok etnis lainnya. Pada jarak budaya itu, faktor agama dapat juga “bermain” dalam pengertian, jika suatu relasi sosial terbingkai dalam muatan kesamaan keagamaan, tidak terdapat kesulitan diantara masyarakat yang saling beriteraksi. Sebagai contoh, kita melihat pendekatan relasi yang sangat mudah diantara kelompok-kelompok etnik yang memiliki tradisi migrasi, dan di antara kelompok etnis yang memiliki peranan penting dalam perdagangan antar pulau (seperti etnis Bugis, Minangkabau, Banjar, Melayu, Jawa dari daerah Pantura Jawa). Sebaliknya, konflik etnis yang terkemas melalui perbedaan agama, seperti yang terjadi dalam kasus Dayak–Madura di Kalimantan, kasus Ketapang dan Ambon, menunjukkan bahwa relasi sosial di antara kelompok-kelompok etnis tidak berjalan dengan baik. Kondisi tersebut diatas memperjelas kepada kita, bahwa proses transformasi sosial pada ruang perkotaan tidak berjalan dengan seimbang, dalam pengertian bahwa formasi sosial penduduk yang berasal dari migran pendatang telah berhasil mendominasi sumber–sumber alokasi kota (ekonomi, politik, kebudayaan dan spatial) sehingga mereka dapat tampil sebagai kelompok elit atau “*the ruling class*” yang menguasai sumber produksi dan ekonomi kota. Sebaliknya, penduduk lokal yakni masyarakat asli, menjadi kelompok yang didominasi, mereka kurang memiliki akses terhadap sumber produksi dan ekonomi kota, sehingga menghasilkan suatu kondisi ketimpangan struktur sosial dan dapat bermuara kepada konflik sosial (Warsilah, 1995 dan 1999).

Kondisi yang terjadi di Indonesia menurut Eep Saifullah, terutama pada masa Orba, negara melakukan tindakan politiknya secara persuasif untuk menciptakan stabilitas yang bermuara pada wujud moral, sehingga diibaratkan negara berperan sebagai “negara budiman”. Negara menjadi wadah tunggal yang mengelola konflik dalam masyarakat. Kondisi demikian berarti, negara berada di atas segala golongan yang selalu mengelola konflik, dan kemudian mendistribusikan secara merata dengan sukarela, tanpa syarat kepada kelas-kelas sosial. Ini dapat diasumsikan, negara sebagai wujud kekuasaan moral yang akan membebaskan, atau membawa ke arah demokratisasi (Eep Saifullah Fatah, *Prisma* No. 8, 1994:64). Kondisi ini menyebabkan konflik-konflik komunal dan kekerasan massa yang muncul pada tatanan masyarakat, tidak dapat diselesaikan dengan baik, karena negara bermain dengan nilai yang seharusnya menjadi wacana

publik. Konflik pada tatanan masyarakat, seharusnya biar diselesaikan dalam masyarakat itu sendiri, dengan demikian negara sebaiknya melepaskan diri dari wacana publik, dengan kata lain negara harus bebas nilai.

Konflik dalam sejarah masyarakat Indonesia memang tidak pernah terselesaikan. Pada realitanya, menurut Amiruddin, pada masa Orba, negara berusaha menekan semaksimal mungkin semua konflik. Kebijakan politik yang diambil oleh rejim Orba, adalah memisahkan massa rakyat dalam proses keputusan politik, dengan alibi klasik yang dilontarkan bahwa, negara merasa trauma dengan kehidupan politik masa lalu, sehingga kehidupan politik yang berbasis massa diharamkan. Akibat pahit getirnya pengalaman politik masa lalu, negara enggan mengambil resiko, sehingga terjadi sentralisasi kekuasaan. Jalan ini diambil pemerintah Orba, untuk menciptakan stabilitas demi pembangunan ekonomi, sehingga perbedaan-perbedaan tidak diperlukan, karena dipandang akan menciptakan instabilitas. Secara umum, masyarakat juga terhegemoni oleh pernyataan politik para penguasa bahwa, negara telah mampu mengatasi konflik dalam masyarakat, kemudian negara mampu menjalankan pembangunan selama lebih dari seperempat abad. Sedangkan kelas-kelas sosial yang lemah pada kondisi itu, akan berlindung dibalik kekuasaan Orde Baru untuk menghindari konflik seperti pernah terjadi pada masa lalu. Berangkat dari kondisi seperti itu, Amiruddin menyimpulkan, bahwa manajemen konflik yang dilakukan negara orde baru, hanya memusatkan kekuasaan politik-ekonomi di tangan birokrasi dan militer. Sehingga konsep 'negara budiman' seperti yang dilontarkan Eep Saefullah, yang diharapkan menjadi panglima moral tidak terjadi dalam negara Orde Baru. Hal ini bisa dilihat dari beberapa kebijakan politik dan ekonomi yang dilakukan negara terhadap masyarakat, seperti yang terjadi selama ini (Amiruddin, Prisma Vol. 11, 1994:94-95).

Kesenjangan Pendidikan dan Pendapatan di Tingkat Etnik

Dimensi vertikal dari masyarakat majemuk Indonesia, antara lain juga dapat kita lihat melalui gambaran tingkat pendidikan masyarakat. Gambaran pendidikan di tiga daerah penelitian seperti yang ditampilkan dalam tabel di bawah ini, menunjukkan bahwa,

mayoritas responden berada pada tingkat pendidikan rendah dan menengah, yakni mencapai jumlah sekitar 58%. Adapun rinciannya sebagai berikut: sekitar 25% berada pada jenjang SLTP dan 33% pada jenjang SLTA tidak tamat, bahkan 12% di antaranya hanya berhasil menikmati pendidikan hingga jenjang sekolah dasar saja. Tentunya gambaran tentang rendahnya tingkat pendidikan berkorelasi positif dengan pekerjaan responden, di mana yang mengaku belum memiliki pekerjaan ada 5%. Sedang yang mengaku bekerja sebagai buruh ada 8%, dan 19% bekerja sebagai pegawai swasta, 15% pegawai negeri dan ABRI, 15% sebagai mahasiswa dan pelajar, 7% Rohaniawan/ Ulama dan aktivis LSM, 31% yang diklasifikasikan bekerja di sektor lain (termasuk pedagang, kerja temporer, dan lainnya).

Tabel 1
 Prosentase Latar Belakang Pendidikan Responden
 di Tiga Daerah Penelitian

Tingkat Pendidikan	Tasik	Pekalongan	Situbundo	Jumlah
Tidak Tamat SD	4	4	3	4
Tamat SD	13	3	8	8
Tdk Tamat SLTP	2	3	2	2
Tamat SLTP	8	10	16	11
Tdk Tamat SLTA	30	51	19	33
Tamat SLTA	38	28	42	36
Tamat Akademi/PT	5	1	8	5

Sumber: Kuesioner No. 5, IPSK-LIPI, 1997/1998

Keterangan:

Tasikmalaya, N = 105

Pekalongan, N = 100

Situbundo, N = 99

Dari sisi pendapatan perbulan umumnya, berada pada level yang rendah. Terdapat sekitar 22% responden yang mengaku memiliki pendapatan kurang dari 100 ribu rupiah, 28% antara 100 hingga 200 ribu rupiah, 19% memperoleh pendapatan hingga 300 ribu rupiah, dan 11% yang mengaku berpendapatan antara 400 ribu dan 500 ribu rupiah.

Berdasarkan prosentase pendapatan itu, maka dapat dibuat dua kategori bahwa pendapatan responden berada pada kategori rendah dan menengah. Kategori ini sebetulnya sudah lebih baik dibanding kondisi sepuluh tahun yang lalu, karena jika dilakukan komperasi data pendapatan dengan perubahan kondisi ekonomi selama sepuluh tahun, mayoritas responden mengaku mengalami perubahan dalam kondisi ekonominya. Realitanya, perubahan pendapatan memang terjadi, tetapi hal itu berkaitan dengan tingkat pendidikan. Mereka yang berada pada jenjang pendidikan SD mengaku tidak pernah mengalami perubahan dalam kondisi ekonominya. Ini berarti bahwa, kondisi perekonomian penduduk di tiga daerah penelitian selama sepuluh tahun yang lalu ternyata keadaannya lebih buruk dari kondisi sekarang.

Tabel 2
 Prosentase Kaitan Level Pendidikan dengan Perubahan Kondisi
 Selama 10 Tahun

Level Pendidikan	Ada Perubahan	Tidak Ada
Tidak Tamat SD	100	0
Tamat SD	68	32
Tdk Tamat SLTP	57	43
Tamat SLTP	77	24
Tdk Tamat SLTA	76	24
Tamat SLTA	80	20
Tamat Akademi/PT	92	8

Sumber: Tabulasi Silang Kuesioner Penelitian Tim IPSK-LIPI

Kalau kita lihat hasil laporan lengkap tentang kerusuhan sosial dan kekerasan massa ini, maka kita mendapat gambaran yang lebih kongkrit tentang kondisi struktur sosial ekonomi penduduk di Tasikmalaya, Pekalongan dan Situbondo. Stratifikasi sosio-ekonomi penduduk Tasikmalaya berdasarkan pengakuan beberapa informan kunci, sebelum era tahun 90-an dalam keadaan relatif baik, di mana peran penduduk asli dalam bidang ekonomi sangat menonjol. Tetapi ketika pembangunan mulai gencar pada tahun 90-an, mulai terjadi

pergeseran peran, di mana posisi pribumi yang kaya digantikan oleh tokoh-tokoh pengusaha Cina. Kondisi demikian tercermin dari stratifikasi ekonomi masyarakat, di mana pada puncak piramida didominasi oleh pengusaha Cina, kemudian strata kedua diduduki oleh pendatang Arab dan Pakistan yang berprofesi sebagai pengusaha bioskop, pemborong dan pedagang. Strata berikutnya ditempati oleh etnis Padang yang memiliki toko-toko foto copy dan rumah makan padang, serta orang Tasikmalaya asli yang menduduki posisi pejabat dan pemilik industri (kulit, garment, kerajinan dan batik). Stratifikasi berikutnya diduduki oleh masyarakat Tasikmalaya yang berprofesi sebagai petani dan pengrajin kecil, sedang stratifikasi terbawah, ditempati oleh mereka yang bermata pencaharian sebagai buruh (tani, bangunan, tambang dan perkebunan), tukang becak, kuli angkut dan pedagang asongan.

Padahal berdasarkan tampilan data mata pencaharian penduduk (lihat tabel 3), diperoleh suatu piramida terbalik, karena mayoritas diisi oleh golongan penduduk yang termasuk kategori rendah, petani dan buruh yang mencapai 83%. Stratifikasi di tengah diisi oleh pengrajin industri kecil, kelompok pedagang dan pegawai negeri. Stratifikasi teratas dikuasai oleh mereka yang berprofesi sebagai pengusaha konstruksi dan angkutan, jumlahnya hanya mencapai sekitar 1,5% saja, itupun didominasi oleh penduduk WNI keturunan Cina, Arab, dan Pakistan¹. Tidak jauh berbeda dengan Tasikmalaya, di daerah Pekalongan, tampilan stratifikasi sosio-ekonomi terendah diisi oleh penduduk asli yang berprofesi dalam bidang industri rumah tangga pembuatan batik, stratifikasi menengahnya diisi oleh golongan pedagang keturunan Arab dan stratifikasi teratas dikuasai oleh para saudagar batik keturunan Cina². Demikian pula gambaran yang diperlihatkan oleh daerah Situbondo, stratifikasi atas dikuasai oleh penduduk keturunan Cina yang berprofesi sebagai pengusaha penggilingan tebu, stratifikasi menengah oleh penduduk keturunan Arab dan pendatang (terutama Makasar, Ambon dan Ternate), sedang

¹ Lihat laporan daerah yang ditulis oleh Henny Warsilah, Faktor-faktor Penyebab Kerusakan Sosial dan Kekerasan Massa Di Tasikmalaya, PPW-IPSK, LIPI, tahun 1997.

² Hamdan Basyar, Faktor-faktor Penyebab Kerusakan di kota Batik Pekalongan, Laporan PPW-IPSK, LIPI, tahun 1997.

lapisan terendah diwakili oleh penduduk setempat yang bermata pencaharian sebagai petani sawah. Jumlah penduduk keturunan Cina di Situbondo sebetulnya hanya sekitar 1% saja dari total penduduk, tetapi menguasai perekonomian setempat³.

Dominasi ekonomi oleh segolongan kecil penduduk keturunan Cina di tiga daerah penelitian, telah menyebabkan terjadinya ketimpangan dan kesenjangan sosial ekonomi, yang pada akhirnya bermuara pada kesenjangan politik. Karena terdapat indikasi, bahwa kebijaksanaan ekonomi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat lebih menguntungkan bagi golongan elite penduduk keturunan Cina. Ini menggambarkan terdapatnya dominasi kekuasaan ekonomi dan politik oleh sejumlah kecil elite masyarakat yang relatif berpendidikan dan tinggal di daerah perkotaan, terhadap kelompok kelas bawah yang relatif kurang berpendidikan, berpenghasilan rendah, tinggal di pedesaan dan tidak memiliki akses terhadap kekuasaan (ekonomi dan politik) seperti yang digambarkan oleh Edward Shill. Oleh karena itu penduduk kelas bawah, yang diwakili oleh mereka yang berpendidikan SD dan bekerja sebagai petani dan buruh relatif lebih sulit menerima kehadiran pendatang non muslim, terlebih-lebih untuk melakukan kerja sama dalam bidang ekonomi. Kondisi ini menjadi logis, karena tanpa jaminan kekuasaan, terutama modal, kerja sama yang dimaksud tidak akan pernah terjadi, kecuali mereka berposisi sebagai buruh.

Tabel 3

Prosentase Kaitan Level Pendidikan dan Kerja Sama dengan Pendatang Non Muslim

Level Pendidikan	Kerja Sama	Tidak Ada
Tidak Tamat SD	46	55
Tamat SD	64	36
Tdk Tamat SLTP	100	0
Tamat SLTP	63	38
Tdk Tamat SLTA	67	33
Tamat SLTA	60	41
Tamat Akademi/PT	79	21

Sumber: Tabulasi Silang Kuesioner Penelitian Tim IPSK-LIPI.

³ Ikrar Nusa Bhakti dan Moch. Nurhasim, Faktor-faktor Penyebab Kerusakan Situbondo. Laporan PPW-IPSK, LIPI tahun 1997.

Hoselitz⁴ menggambarkan struktur ekonomi seperti yang tergambar di tiga daerah penelitian, cenderung mengarah kepada *The Private Self Interest*, di mana penduduknya memiliki hubungan struktural yang tajam dan dimonimasi oleh golongan elite, yaitu kelompok atas yang memonopoli ekonomi, kekuasaan politik dan pendidikan. Keadaan ini berimplikasi terhadap pembentukan kelas sosial dalam masyarakat, yang unsur-unsur dominannya adalah kekuasaan ekonomi, pendidikan dan kekuasaan politik. Menurut Hoselitz, dalam struktur sosial yang demikian, kekuasaan pemimpin tertinggi adalah bersifat mutlak, maka organisasi ekonomi dan undang-undang dirancang untuk melayani tujuan-tujuan dari pemimpin itu sendiri. Implikasi lainnya, dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat yang demikian, terdapat kesulitan-kesulitan mendasar, yakni menghubungkan faktor-faktor sosial dan budaya karena variabel-variabel ekonomi sangat dominan.

Kesenjangan Hubungan Antar Kolektivitas Etnis di Tiga Daerah Penelitian

Temuan penelitian di tiga daerah penelitian menunjukkan bahwa dari latar belakang etnis, daerah Tasikmalaya dihuni oleh mayoritas etnis Sunda, Pekalongan etnis Jawa (Tengah), dan Situbondo dihuni oleh mayoritas etnis Jawa (Timur) dan Madura. Pengambilan sampel di Situbondo lebih bervariasi, walau etnis Jawa dan Madura merupakan kelompok etnik dominan, tetapi kelompok etnik lainnya sempat terjaring, termasuk etnik Cina.

Daerah Tasikmalaya walau referensinya adalah daerah Pasundan dengan dominasi budaya sundanya, tetapi terjaring juga responden yang berasal dari kelompok etnik Jawa dan Arab. Tingginya konsentrasi kelompok etnis Sunda di Tasikmalaya ini, karena Tasik merupakan daerah Priangan Timur yang terkenal dengan kota seribu pesantren dan merupakan pusat orang "Sunda kolot" (sunda tua)⁵ yang

⁴ Pert F. Hoselitz, *Sociological Aspects of Economic Growth*, The Free Press, New York, 1960, p. 11-27

⁵ Di Tasikmalaya terdapat suku asli sunda yang masih mempertahankan dan menjalankan tradisi lama sesuai dengan tradisi peninggalan nenek moyangnya, yakni *Kampung Naga*.

mampu menarik migran sunda lainnya yang berasal dari daerah Bandung, Sukabumi, Cianjur, Garut dan Bogor untuk menetap di sana atau menyelesaikan pendidikannya. Sedang di daerah Pekalongan, penduduknya cenderung lebih homogen dari latar belakang etnis dan budaya (Jawa). Hal itu dapat ditelusuri dari lamanya responden menetap di ketiga daerah penelitian, di daerah Pekalongan terjaring hanya sekitar 15% responden yang lama menetapnya antara 1 - 20 tahun. Di Tasikmalaya yang kental dengan budaya Sunda dan Situbundo yang terkenal dengan dominasi budaya Jawa Timurnya, terjaring masing-masing sekitar 45% yang mewakili kelompok pendatang. Namun demikian, tanggapan responden di ketiga daerah penelitian, menganggap kehadiran pendatang sebagai hal wajar sepanjang tidak merugikan dapat diterima secara terbuka. Tetapi konsep keterbukaan itu tidaklah selalu implisit dan berlaku umum bagi keterbukaan dalam kerja sama untuk suatu bentuk usaha. Pada umumnya, mayoritas responden lebih merasa *sreg* jika melakukan kerja sama dengan sesama kelompok etnis atau orang satu daerah, sedang kerja sama dengan etnis lain dapat terjadi sepanjang memiliki kesamaan agama (Islam).

Tabel 4
 Prosentase Asal-Usul Etnis Responden di Tiga Daerah

Kelompok Etnis	Tasik	Pekalongan	Situbundo	Jumlah
Jawa	5,7	98,0	26,3	42,8
Sunda	91,4	0,0	0,0	31,6
Batak	0,0	0,0	1,0	0,3
Cina	0,0	1,0	9,2	3,3
Mandura	0,0	0,0	59,6	19,4
Arab	1,9	1,0	0,0	1,0
Etnis lainnya	0,0	0,0	4,0	1,3

Sumber: Kuesioner No. 32, IPSK-LIPI, 1997/1998

Kondisi seperti yang terjadi di tiga daerah penelitian dapat dijelaskan melalui pendekatan Barth (1969) tentang batas-batas budaya kelompok etnik. Menurut Barth, justru budaya etnik akan

dapat bertahan walaupun suku-suku bangsa tersebut saling berbaaur. Dengan kata lain, adanya perbedaan antar etnik tidak ditentukan oleh tidak terjadinya pembauran, kontak dan pertukaran informasi. Namun lebih disebabkan oleh adanya proses-proses sosial berupa pemisahan dan penyatuan, sehingga perbedaan kategori tetap dipertahankan walaupun terjadi pertukaran peran serta keanggotaan di antara unit-unit etnik dalam perjalanan hidup seseorang. Sebaliknya, dapat ditemukan hubungan sosial yang mantap, bertahan lama dan penting antara dua kelompok etnik yang berbeda, yang biasanya terjadi karena adanya status etnik yang terpecah dua (terdikotomi). Dengan kata lain, ciri masing-masing kelompok etnik yang berbeda tersebut tidak ditentukan oleh tidak adanya interaksi dan penerimaan sosial, tetapi sebaliknya, justru karena didasari oleh terbentuknya sistem sosial tertentu. Interaksi yang demikian tidak akan mengakibatkan terjadinya pembauran dengan perubahan budaya dan akulturasi. Perbedaan-perbedaan budaya kelompok etnik justru akan tetap bertahan, walaupun terjadi hubungan dan adanya saling ketergantungan antar etnik (Frederik Barth: 1969:9-10).

Tabel 5
Prosentase Kegiatan Etnis dan Kerja Sama dengan Agama Lain

Kelompok Etnis	Ya	Tidak
Jawa (Tengah + Timur)	62	38
Sunda	68	32
Batak	100	0
Cina	60	40
Mandura	59	41
Arab	100	0
Etnis lainnya	75	25

Sumber: Tabulasi silang kuesioner, Tim IPSK-LIPI

Tampilan tabel di atas, memperlihatkan bahwa, walaupun mayoritas responden mengaku melakukan kerjasama dengan kelompok etnis lainnya, tetapi terdapat kecenderungan menarik bahwa untuk tiga kelompok etnik yang menjadi kajian (Jawa, Sunda

dan Madura) secara tegas juga memilih untuk tidak melakukan kerja sama dengan pendatang di luar kelompok etniknya. Gejala demikian dapat dipahami melalui rentang hubungan antar kolektivitas etnis (manusia) yang cenderung memiliki kesenjangan komunikasi dan berakarnya sikap fanatisme keagamaan.

Pada umumnya, penduduk asli Indonesia mengidentifikasi pendatang non muslim sebagai orang cina, padahal banyak pendatang non muslim juga yang berasal dari suku asli Indonesia. Kemudian, masyarakat umum selalu beranggapan bahwa semua orang cina itu kaya dan menguasai ekonomi, padahal banyak juga pribumi yang relatif kaya dan menguasai produksi setempat. Pandangan itu jelas dipengaruhi oleh faktor sejarah sosial tentang kedudukan orang Cina pada masa pemerintahan kolonial Belanda, di mana mereka selalu mendapat posisi istimewa dalam bidang ekonomi, sosial dan politik, dibandingkan dengan penduduk pribumi. Sehingga penduduk Cina dapat tampil sebagai kekuatan ekonomi.

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah orde baru menetapkan peraturan yaitu PP No.10/tahun 1959, yang mengharuskan golongan penduduk Cina tidak boleh tinggal di desa, mereka harus menetap di kota. Otomatis golongan Cina terkonsentrasi di daerah perkotaan, kemudian menjadi kelompok eksklusif. Sementara kelompok pribumi datang ke kota untuk bekerja dan berbelanja pada mereka. Keberhasilan penduduk Cina dalam usaha dagang, juga dapat dihubungkan dengan kondisi tertutupnya bidang pekerjaan lain selain berdagang pada masa itu. Oleh karena itu kebanyakan orang Cina sukses dalam usaha dagang, bahkan dapat tampil sebagai pengusaha besar yang ternama. Pada perkembangannya, upaya dan kiat untuk meraih tujuan akhir dari pengusaha dan pedagang Cina, berupa keuntungan sebesar-besarnya menimbulkan praktek kolusi antara pemegang kekuasaan dengan Cina pengusaha, sehingga kebijaksanaan ekonomi yang diterapkan pemerintah pusat dan daerah, lebih sering menguntungkan golongan ini.

Secara otomatis, penduduk keturunan Cina ahli dalam bidang perdagangan, ini berhubungan juga dengan kultur Cina, yakni sebagai pekerja keras, karena memang pada umumnya mereka berasal dari desa-desa miskin. Sehingga etos kerja orang Cina menjadi etos kerja keras dan etos dagang. Sebaliknya kelompok penduduk pribumi sangat jarang yang memiliki etos kerja keras dan etos dagang,

sehingga perbedaan kultur yang berimplikasi kepada kesuksesan orang cina melahirkan rasa kecewa dan cemburu yang berkepanjangan dalam masyarakat Indonesia lainnya. Dan membuat hubungan antara komunitas masyarakat Indonesia asli dan komunitas masyarakat keturunan Cina menjadi buruk.

Kondisi demikian tergambar dari jawaban yang diberikan responden di tiga daerah penelitian, atas pertanyaan apakah menurut pendapat mereka terdapat pemerataan dalam bidang ekonomi dalam kehidupan masyarakat? Diperoleh jawaban signifikan bahwa mereka menganggap tidak ada pemerataan, seperti terurai dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6
Prosentase Kaitan Etnis dengan Pandangan Terhadap Pemerataan

Kelompok Etnis	Ada	Tidak Ada
Jawa (Tengah + Timur)	22	78
Sunda	30	70
Batak	0	100
Cina	56	44
Mandura	24	76
Arab	33	67
Etnis lainnya	100	0

Sumber: Tabulasi silang kuesioner, Tim IPSK-LIPI

Tidaklah mengherankan, bila tampilan tabel di atas dihubungkan dengan keterlibatan kelompok etnis dominan di daerah penelitian terhadap aksi unjuk rasa, maka ketiganya mengakui pernah melakukan unjuk rasa, walaupun proporsinya masih kecil. Tetapi, kelompok etnis Sunda yang mengakui terlibat dalam aktivitas unjuk rasa di Tasikmalaya jumlahnya mencapai separuh dari responden. Ada lima kemungkinan mengapa mereka sering tampil dalam peristiwa unjuk rasa. *Pertama*, adalah karena secara geografis daerah Tasikmalaya dekat dengan kota Bandung dan Jakarta, sehingga arus informasi lebih cepat sampai dibandingkan dengan daerah Sitobundo dan Pekalongan. *Kedua*, orang Sunda lebih berani mengekspresikan

rasa kecewa dan rasa tidak puasnya dengan cara berdemonstrasi. *Ketiga*, sudah terlalu banyak beban kekecewaan yang diderita penduduk Tasikmalaya. *Keempat*, ketika penelitian ini sedang berlangsung, buntut peristiwa kerusuhan 26 September 1996 (penganiayaan kyai oleh aparat polisi) masih terus berlanjut, bak api dalam sekam, sehingga responden masih merasa trauma. *Kelima*, kemungkinan responden yang terjaring di Tasikmalaya, lebih banyak diwakili oleh mahasiswa yang memang sering mengekspresikan sikap politiknya melalui demonstrasi/unjuk rasa.

Tabel 7
 Prosentase Kaitan Etnis dengan Keterlibatan dalam Unjuk Rasa

Kelompok Etnis	Tidak Pernah	Pernah
Jawa (Tengah + Timur)	72	28
Sunda	50	51
Batak	100	0
Cina	100	0
Mandura	76	24
Arab	100	0
Etnis lainnya	100	0

Sumber: Tabulasi silang kuesioner, Tim IPSK-LIPI

Penutup

Kalau dilakukan analisa sosiologis pada peristiwa kerusuhan sosial dan kekerasan massa yang berlangsung di tiga daerah penelitian, maka pertama-tama, ada tiga kelompok masyarakat yang kecewa, yakni: 1). Kelompok Ulama-Santri, 2). Kelompok Etnik dominan yang anti Cina, dan 3). Kelompok Marginal. Secara kebetulan ketiga kelompok ini bersatu dalam kasus penganiayaan santri oleh oknum aparat kepolisian di Tasikmalaya, dan ketika muncul peristiwa penodaan doktrin agama di Situbondo, serta terjadinya perebutan simbol atribut kampanye di Pekalongan. Sehingga peristiwa tersebut muncul sebagai kasus beli, karena masyarakat (muslim) di tiga daerah penelitian seolah-olah

mendapatkan saluran untuk menumpahkan kekecewaan dan ketersinggungannya, walau hal tersebut di alamatkan kepada kelompok etnis non muslim dan pendatang. Pada kondisi demikian, konflik etnik seharusnya diartikulasikan dalam konflik kelas sosial ekonomi.

Kedua, benang merah peristiwa kerusuhan sosial dan kekerasan massa di tiga daerah penelitian adalah masalah kesenjangan HAM, bukan dalam pengertian Hak Azasi Manusia, tetapi dalam arti Hubungan Antar Manusia. Di mana telah lama berlangsung kesenjangan sosial, budaya, ekonomi, politik dan komunikasi diantara:

1. Penduduk asli (etnis pribumi) dengan masyarakat keturunan Cina,
2. Kesenjangan antara komunitas muslim dengan komunitas masyarakat Kristen
3. Kesenjangan antara masyarakat umum dengan penguasa setempat (pejabat dan aparat pemerintah)

Kemudian, telah terjadi politisasi agama, di mana jika agama telah dipolitisir berpotensi untuk menggerakkan masa, karena agama merupakan hal yang paling sensitif. Pada umumnya masyarakat di daerah pedesaan akan menerima begitu saja isu yang beredar, isu-isu yang kurang benar, karena berkaitan dengan kondisi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat secara umum. Keterbelakangan pendidikan akan melahirkan ketersempitan wawasan dan budaya (sikap ketertutupan dan orientasi yang spesifik).

Dalam kerusuhan yang bernuansa etnis tersebut, definisi identitas menjadi sangat penting, dan pada situasi tertentu menjadi lebih dipertegas. Dalam pengertian, terjadinya penguatan simbol-simbol identitas dalam setiap kerusuhan menunjukkan makin kuatnya kehidupan pribadi yang diartikulasikan dalam kehidupan publik sebagai ciri terjadinya suatu pengkotakkan sosial. Dalam berbagai kerusuhan di tiga daerah penelitian, agama dan identitas etnis menjadi demikian penting, untuk menggolongkan orang-orang dalam suatu blok yang harus dimusuhi atau sebaliknya harus dibela. Kemudian, persoalan etnisitas berdasarkan temuan penelitian, adalah merupakan masalah yang sangat problematik. Karena pengertian etnisitas pada kenyataannya, tidak hanya mencakup soal budaya,

tetapi juga berkaitan dengan soal keturunan (genetika) yang sulit untuk disembunyikan secara fisik. Ini berarti, seseorang dapat saja dipandang memiliki budaya Sunda, karena dia mampu berbahasa Sunda dan berperilaku sebagai orang Sunda umumnya. Tetapi, secara fisik dia bukanlah orang Sunda, karena faktor-faktor genetiknya berbeda dengan orang Sunda.

Daftar Pustaka

- Amiruddin, 1994, "Demokrasi dan Negara Orde Baru", dalam *Prisma*, 11.
- Durheim, Emile, 1947, *Division of Labour in Society*, New York, The Free Press.
- Geertz, Clifford, 1963, "The Intergrative Revolution Primordial Sentiment and Civil Politics in the New State", dalam Geertz, ed., *Old Societies and New State*, New York, the Free Press of Glencoe.
- Hoselitz, Perth F., 1960. *Sociological Aspect of Economic Growth*, New York, *The Free Press*.
- L. Van, Piere dan Berghe, 1984, "Pluralisme and the Polity: a Theoretical Exploration", dalam Nasikum, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Marx, Karl, 1910, *The Poverty of Philosophy*, Chicago, Charles H. Kerr and Co.
- Nasikun, 1984, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta, Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Parsons, Talcott, 1949. *The Structure of Social Action*, New York, The Free Press.
- Saefullah, Eef Fatah, 1994 dalam *Prisma*, 4.

Tan, Mely G. dan Budi Soeradi, 1986, dalam: "Ethnicity and Fertility in Indonesia", *Research Notes and Discussions* paper No. 53. Penerbit ISEAS, Singapore.

Turmudi, Endang, 1995, Religion and Politics: a Case Study or Political Attitudes of Devout Muslim and the Role of Kyai in Contemporary Java, *Southeast Asian Journal*.